

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan judul

Alasan saya mengambil judul ini bermula ketika saya membaca sebuah artikel di salah satu website yang menceritakan tentang sejarah perekonomian Brazil, dari awal berdirinya negara Republik tersebut hingga sekarang. Sejarah perekonomian Brazil ini sangat menarik, terutama tentang kebijakan hutang luar negerinya hingga keberhasilannya melunasi hutang-hutang tersebut. Berikut ringkasan sejarah pembangunan perekonomian Brazil.

Sejarah pembangunan perekonomian Brazil yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terdahulu untuk berhutang kepada Negara-negara maju di Eropa serta terhadap lembaga keuangan Internasional seperti IMF. Kebijakan hutang luar negeri Brazil setiap tahunnya terus meningkat. Kebijakan ekonomi yang salah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu membuat Brazil terjebak dalam hutang yang semakin menumpuk. Ini dikarenakan pemasukan yang didapat oleh Brazil tidak mencukupi untuk menutupi hutang-hutang luar negerinya.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terdahulu tidak dapat mengatasi Brazil untuk melunasi hutang-hutangnya. Ketimpangan dalam masyarakat juga semakin terasa. Inilah yang membuat perekonomin Brazil terpuruk untuk beberapa tahun yang lalu. Pemerintah Brazil tidak sanggup menutupi hutang-hutang terdahulu, yang pada akhirnya kembali mengambil

kebijakan untuk berhutang kembali kepada IMF demi menutupi krisis ekonomi yang pernah melanda Negara ini.

Pada tahun 2002, setelah terpilihnya Lula Da Silva, perubahan kebijakan ekonomi mulai dilakukan oleh Brazil. Lula da silva mengambil kebijakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, investasi, serta meningkatkan ekspor yang membuat perekonomian Brazil mulai membaik. Tingkat inflasi turun drastis, nilai Real di pasaran dunia naik, dan investor menunjukkan kepercayaan terhadap jalur ekonomi yang ditempuh oleh Brazil.

Kebijakan ekonomi sosial demokratnya ini mampu membuat perubahan besar bagi perekonomian Brazil. Pada pemerintahan Lula ini juga Brazil berhasil melunasi hutang luar negerinya terhadap Paris Club dan IMF. Cadangan devisa Brazil juga semakin meningkat. Ketimpangan ekonomi dalam masyarakat juga dapat dihilangkan.

Oleh karena itulah menimbang dari uraian singkat diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul : UPAYA PRESIDEN BRAZIL LULA DA SILVA MENGATASI HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP IMF (2003-2008)

B. Latar Belakang Masalah

Keadaan ekonomi Brazil yang mulai memperlihatkan kemajuan terutama dalam sektor industri telah membuat Brazil dipandang sebagai negara yang memiliki teknologi industri yang sangat maju dikawasan Amerika Latin. Tentu keberhasilan ini tidaklah mudah dihadapi Brazil. Jatuh bangun Brazil dalam membangun perekonomiannya tidak dapat dilepaskan dari sosok seorang kepala

negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Brazil yang makmur.

Dahulunya Brazil dikenal sebagai negara dengan perekonomian yang sangat buruk. Hutang-hutang luar negerinya sangat besar, terutama hutang terhadap IMF. Lembaga Moneter Internasional ini telah lama berada dalam perekonomian Brazil. Hutang-hutang tersebut setiap tahunnya semakin bertambah dan Brazil tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

Keberadaan IMF pertama kali terlihat pada masa pemerintahan Jose Sarney sebagai Presiden sipil yang diambil sumpahnya sebagai Presiden setelah presiden Tancredo Neves meninggal. Pada masa pemerintahan dibawah pimpinan Jose Sarney tahun 1985-1990 segera berhadapan dengan dua permasalahan utama yaitu krisis ekonomi dan kewajiban untuk mengawal transisi menuju demokrasi¹.

Permasalahan ekonomi merupakan tantangan bagi setiap Presiden terpilih. Untuk menyelesaikan krisis dan inflasi yang mencapai angka 300 persen merupakan fokus utama Serney untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu menekan krisis ekonomi Brazil. Cruzado Plan merupakan kebijakan yang di ambil pemerintah dibawah pimpinan presiden Serney. Kebijakan ini dimaksudkan pada upaya pemerintah untuk membekukan atau menyetabilkan fluktuasi harga-harga kebutuhan dan gaji pekerja agar inflasi tidak menjadi-jadi. Kebijakan ini mampu menekan inflasi di Brazil dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

¹ <http://rum-omnibus.blogspot.com/2007/02/brazil-transisi-yang-damai-sosialisme.html>

Akan tetapi pada masa pemerintahan dibawah pimpinan presiden Serney juga tidak dapat menghindar untuk tidak menambah hutang-hutang Brazil. Serney kembali mengambil langkah untuk meminjam kepada IMF. Kebijakan ini semakin menambah daftar panjang hutang-hutang luar negeri Brazil.

Kebijakan Cruzado Plan tersebut tidak serta merta memulihkan perekonomian Brazil. Dampak lain dari kebijakan ini adalah meningkatnya defisit dalam anggaran pengeluaran publik, sedang bank-bank asing menolak untuk memberikan pinjaman kecuali pemerintah melakukan perbaikan dengan mengurangi intervensi ekonomi. Hal ini juga menyebabkan pemerintah kembali terbebani atas tingkat suku bunga yang tinggi dari hutang-hutang luar negeri Brazil. Dengan kondisi ekonomi seperti ini tentu tidak memungkinkan pemerintah untuk melunasi hutang-hutang luar negeri Brazil.

Pada masa pemerintahan dibawah pimpinan presiden Itamar Franco tahun 1992-1995 ekonomi Brazil makin semrawut. Dalam tempo tiga bulan, dua menteri ekonominya mengundurkan diri. Sementara itu, target permulaan pemerintahannya adalah mengekang inflasi yang 30% sebulan. Adapun GDP (Produk Domestik Bruto, angka yang sering dipakai sebagai petunjuk produktivitas sebuah masyarakat). GDP riil per kepala menurun 10% dari angka 1978. Menurut wartawan Newsweek, Brook Larmer dan Mac Margolis, Brazil tak punya kemewahan untuk memberantas kemiskinan di daerah slum itu. Uangnya tersedot untuk kewajiban mencicil US\$ 120 miliar hutang luar negerinya sebesar

US\$ 8 miliar setahun.² Tapi hal ini masih belum bisa menuntaskan hutang-hutang tersebut hingga akhir jabatannya.

Sedangkan pada masa pemerintahan dibawah pimpinan presiden Fernando Henrique Cardoso tahun 1995-2003, Cardoso dan sebuah tim ekonomi kemudian menyusun Plano Real. Rencana ini disusun untuk membuat satu mata uang baru, yaitu Real. Langkah ini dilakukan karena mata uang terdahulu, Cruzeiro telah melorot nilainya secara tajam. Standar temporer dari mata uang yang digagas oleh Cardoso adalah Dolar Amerika Serikat. Plano Real juga bertujuan untuk mengurangi inflasi tanpa harus membekukan harga dan gaji.

Kebijakan Cardoso ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis. Akan tetapi hal ini tidak serta merta pro-kalangan bisnis. Ada beberapa kebijakan yang liberal seperti upaya pemerintah untuk mengurangi ketegangan antara Fazendeiro, para tuan tanah, yang berhadapan dengan rakyat di daerah pedesaan yang tidak memiliki lahan pada tahun 1995. Brazil adalah negara dengan ketimpangan kepemilikan tanah terburuk di Amerika Latin. Cardoso menyetujui sebuah dekrit presiden yang mengambil alih kepemilikan lebih dari 100.000 hektar tanah dari para tuan tanah dan sektor swasta dan membagi-bagikannya kepada 36.000 keluarga miskin. Pada tahun 1996, Cardoso menandatangani dekrit merevitalisasi peran Biro Urusan Penduduk Asli. Tentunya kebijakan ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi bagi kehidupan penduduk asli yang miskin³.

Kebijakan ekonomi yang dibangun oleh Fernando Henrique Cardoso ini mendapat ujian ketika dampak krisis finansial di kawasan Asia tahun 1997 juga

² <http://www.countrystudies.us/brazil/55.htm>

³ *ibid*

dirasakan negara ini. Ini membuat pemerintah Brazil mengambil berbagai kebijakan. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menghindarkan Brazil dari dampak krisis tersebut. Hal ini mendorong pemerintah Brazil mengambil kebijakan untuk melakukan negosiasi dengan IMF. Dari hasil negosiasi tersebut, Brazil berhasil meminjam \$41,5 milyar yang digunakan untuk melindungi perekonomian Brazil.⁴

Dengan pinjaman ini pemerintah Brazil tetap tidak bisa melindungi perekonomiannya. Ditambah pada tahun 2001 krisis ekonomi dialami negara tetangganya Argentina. Dengan kesulitan ekonomi yang dihadapinya, pertumbuhan ekonomi negara ini hanya mengalami kenaikan 4,4 persen. Hal ini membuat kepercayaan rakyat Brazil terhadap pemerintahan F. H . Cardoso mulai menurun.

Sosok pemimpin yang baru dan perubahan sangat dibutuhkan oleh rakyat Brazil. Sehingga pada pemilihan tahun 2002 sosok Lula Da Silva, Kandidat dari Partido Dos Trabalhadores mendapat perhatian yang besar dari rakyat Brazil. Ini dikarenakan sosok Lula Da Silva yang berasal dari kalangan pekerja dengan fokusnya terhadap perbaikan ekonomi Brazil dianggap mampu membawa rakyat Brazil ke arah yang lebih baik. Janji-janji kampanyenya sangat diharapkan rakyat Brazil akan terealisasi dengan baik.

⁴ <http://rum-omnibus.blogspot.com/2007/02/brazil-transisi-yang-damai-sosialisme.html>

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah diatas maka dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu : “ Bagaimana upaya pemerintah Brazil di bawah pimpinan presiden Lula Da Silva dalam mengatasi hutang luar negeri terhadap IMF pada tahun 2003-2008 ?

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka penulis menggunakan suatu teori yang nantinya mampu menjawab dan menganalisa kebijakan pemerintah Brazil dalam mengatasi hutang luar negeri terhadap IMF pada masa pemerintahan Lula Da Silva.

1. Teori Pengambilan Keputusan

Teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut eksekutif, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintahan, yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan negara. Tindakan

negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara.⁵

Menurut teori pembuatan keputusan, para pembuat keputusan dan kebijakan politik luar negeri suatu bangsa pasti akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan luar negerinya. Menurut William D. Coplin, ada tiga faktor yang mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil suatu keputusan yaitu :

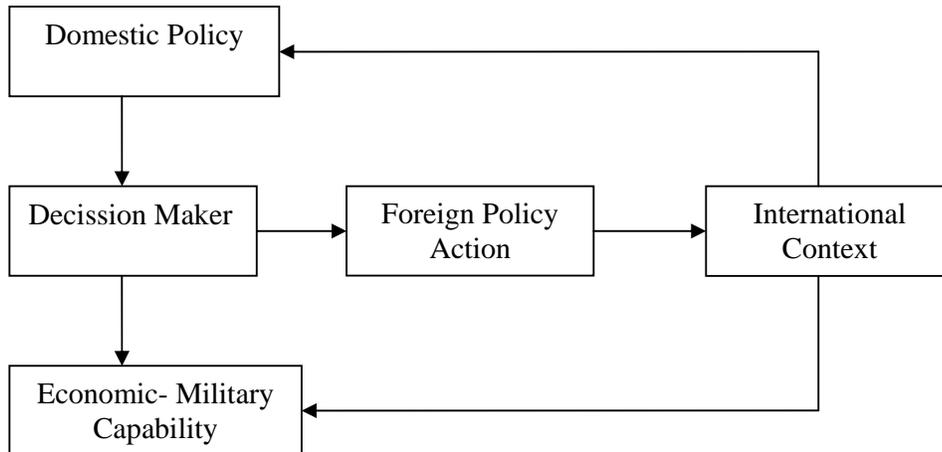
1. Kondisi dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi didalam negara yang akan membuat keputusan, yang berkaitan dengan masalah keputusan tersebut, termasuk di dalamnya faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
2. Kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
3. Konteks Internasional, yaitu suatu produk tindakan luar negeri seluruh negara pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang mungkin di antisipasi. Hal ini menyangkut situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁶

⁵ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Study*, Terjemahan Amien Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito (Yogyakarta : FISIPOL UMY, 1995), p.373

⁶ William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A theoretical Overview* (terjemahan M. Marbun), Bandung, CV. Sinar Baru, 1992

Gambar 1

Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, *Introduction to International Politics, A theoretical Overview* (terjemahan M. Marbun), Bandung, CV. Sinar Baru, 1992,Hal.30

Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa faktor dan interaksi yang saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri Brazil. Faktor-faktor tersebut yang telah mempengaruhi sikap pemerintahan Brazil dalam mengatasi masalah hutang luar negeri terhadap IMF pada masa kepemimpinan presiden Lula Da Silva.

a. Kondisi politik dalam negeri Brazil

Faktor kondisi politik dalam negeri menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah Brazil dalam hal ini para pembuat kebijakan luar negeri Brazil dalam memutuskan suatu kebijakan luar negerinya. Keadaan politik dalam negeri Brazil dalam hal ini sistem pemerintahan Presidensial yang dianut Brazil memungkinkan seorang Presiden membuat suatu kebijakan. Oleh karenanya kebijakan yang dibuat seorang Presiden sangat menentukan masa depan Brazil.

Dengan sistem pemerintahan yang seperti ini, performa seorang Presiden sangat berpengaruh besar dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Seperti Lula Da Silva, selama kepemimpinannya Brazil mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap kaum kelas bawah.

Kemajuan yang dirasakan oleh Brazil ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat Brazil. Walaupun pada kenyataannya kesenjangan yang terjadi mulai samar terlihat, akan tetapi masih ada sebagian rakyat yang masih memprotes sistem ekonomi yang dijalankan oleh Lula Da Silva. Mereka memprotes sistem ekonomi neoliberal yang masih dipertahankan oleh Lula Da Silva. Mereka menganggap bahwa sistem ekonomi ini menjebak Brazil kedalam sistem ekonomi yang dibuat oleh negara-negara maju.

Akibat dari aksi penolakan sebagian masyarakat yang menggabungkan diri dalam sebuah perkumpulan pengangguran partisipatif Brazil ini mengakibatkan situasi politik dalam negeri Brazil sedikit goyah. Gerakan demonstrasi menolak sistem ekonomi Cardoso yang masih dijalankan oleh Lula semakin sering terjadi. Gerakan-gerakan ini menganggap bahwa sistem ekonomi yang dianut Lula semakin menjebak Brazil kedalam hutang-hutang Luar negeri yang ditawarkan oleh produk-produk neoliberal seperti IMF.

Dengan pertimbangan inilah Lula kemudian mengubah arah pembangunan ekonominya dari Neoliberal menjadi sosial moderat. Adanya tuntutan rakyat membawanya untuk mengubah sistem ekonominya yang kemudian membuat Lula mengambil kebijakan untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap IMF.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Brazil merupakan negara di Amerika Latin yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan perekonomiannya. Selama pemerintahan Brazil dikuasai oleh rezim militer, perekonomian Brazil semakin terpuruk. Hutang-hutang luar negeri Brazil semakin meningkat. Jumlah kaum miskin di negara tersebut semakin meningkat. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin adalah permasalahan yang cukup substansial di Brazil.

Ketika Brazil dibawah kepemimpinan F.H Cardoso, keadaan ekonomi Brazil juga tidak membaik. Walaupun banyak usaha yang dilakukan pemerintah tersebut untuk memulihkan perekonomiannya. Termasuk meminta bantuan hutang luar negeri kepada IMF sebesar 4,41 milyar dolar paket pinjaman baru untuk melindungi perekonomian Brazil. Sebagai balasannya, Cardoso sepakat untuk menyusun peraturan yang mengurangi pengeluaran pemerintah dan merestrukturisasi perpajakan di Brazil. Pada 1999. keadaan pemerintah Brazil semakin memburuk ketika terjadi resesi ekonomi di negara tetangganya Argentina. Ini membuat kepercayaan rakyat Brazil terhadap pemimpinnya mulai menurun.⁷

Keterpurukan ekonomi ini akhirnya bisa diselamatkan oleh Lula Da Silva dengan program-program ekonominya. Dari performa pemerintahan Lula Da Silva yang baik hingga saat ini. Trend kepemimpinan sosialisme moderat di Brazil setidaknya akan terjaga bila keberhasilan ini bisa dipertahankan. Tidak hanya untuk masyarakat Brazil sendiri, kinerja pemerintah Brazil di bawah

⁷ <http://rum-omnibus.blogspot.com/transisi-yang-damai>

kepemimpinan presiden Lula Da Silva tentunya juga berpengaruh terhadap publik Amerika Latin, yang memang mengharapkan kebijakan alternatif mampu membawa kemandirian bagi kawasan yang terkenal akan kondisi ekonominya yang buruk. Ada beberapa catatan penting yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan kubu kiri-tengah Brazil untuk menjaga pembangunan ekonomi berada dalam rel yang diinginkan menuju kemandirian ekonomi. Yaitu, terkait dengan Pembangunan Ekonomi, Non-rasialisme, dan Kebijakan Ekonomi dan Politik Luar Negeri.

Fokusnya pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula Da Silva dengan pembangunan perekonomian Brazil khususnya sektor perdagangan dan industrial, hingga pada tahun 2005 Brazil mampu meningkatkan cadangan devisa pada tahun 2003 hanya \$14 milyar menjadi \$66,7 milyar.⁸ Ini memperlihatkan kesuksesan perekonomian yang dibangun pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula Da Silva.

Dengan cadangan devisa yang meningkat ini dan kondisi ekonomi yang semakin membaik, pemerintah Brazil dalam hal ini Presiden Lula Da Silva mengambil inisiatif untuk melunasi hutang-hutang luar negerinya lebih awal. Ini menunjukkan kemampuan ekonomi Brazil yang mulai bangkit membuat negara ini mengambil langkah untuk mengakhiri ketergantungannya terhadap lembaga-lembaga pendonor seperti IMF. Inilah langkah awal bagi perekonomian Brazil menuju kondisi yang lebih baik.

⁸ [http://www.detikfinance.com/read/2005/12/14/095023/498317/4/brazil-lunasi-hutang-ke-imf-sebesar-US\\$-15,5milyar](http://www.detikfinance.com/read/2005/12/14/095023/498317/4/brazil-lunasi-hutang-ke-imf-sebesar-US$-15,5milyar)

c. Konteks Internasional

Faktor konteks internasional merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembuat kebijakan Brazil untuk membuat suatu keputusan yang akan menentukan nasib Brazil dimasa yang akan datang. Keputusan Brazil untuk melunasi hutang-hutangnya terhadap IMF merupakan bentuk dari kemampuan negara ini untuk tidak tergantung pada hutang-hutang dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam konteks Internasional kemampuan perekonomian suatu negara merupakan tolak ukur seberapa besar kekuatan negara tersebut. Brazil dimata dunia internasional termasuk kedalam kelompok negara berkembang. Dimata internasional, negara berkembang dianggap sebagai negara yang tidak kuat secara perekonomian juga lemah sebagai satu kesatuan negara.

Dengan pertimbangan yang dilihat dari faktor konteks internasional inilah Brazil mengambil keputusan untuk tidak lagi bergantung terhadap IMF serta lembaga keuangan internasional lainnya dalam pembangunan perekonomiannya. Brazil beraggapan, dengan kemampuannya melunasi semua hutang-hutangnya dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional bisa mengangkat posisinya sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta dapat membawa negaranya sebagai negara dengan perelonomian terkuat dikawasan Amerika latin.

Dengan posisinya sebagai negara dengan perekonoomian yang pesat di kawasan Amerika Latin, membuat Brazil tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat internasional. Bahkan kini Brazil merupakan perwakilan dari kawasan

Amerika Latin dalam setiap perundingan-perundingan Internasional. Inilah yang menjadi alasan bagi Brazil untuk melunasi semua hutang-hutangnya, agar didalam konteks Internasional posisi Brazil tidak lagi dianggap sebagai negara dengan sistem perekonomian yang buruk, akan tetapi Brazil mampu membuat negaranya menjadi negara penting dalam setiap perundingan Internasional.

2. Strategi Pengelolaan Utang Luar Negeri

Strategi ini disiapkan untuk mengantisipasi masalah likuiditas dan solvabilitas guna mencapai kesinambungan fiskal dan perekonomian, terkait beban hutang luar negeri yang dapat membawa negara ke jurang kebangkrutan total. Strategi ini di harapkan mampu membawa Perekonomian kearah yang lebih baik.

Strategi ini meliputi empat hal yang berkaitan yaitu (1) percepatan pencapaian batas aman hutang luar negeri, (2) penetapan prioritas penggunaan hutang luar negeri, (3) pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutang (*Debt Management Office/DMO*), serta (4) pembentukan perangkat peraturan bagi landasan kebijakan pengelolaan hutang luar negeri.⁹

Mengenai batas aman pencapaian indikator-indikator batas aman hutang luar negeri harus segera diupayakan secepatnya agar terhindar dari berbagai risiko yang bisa berdampak fatal terhadap perekonomian. Namun, percepatan pencapaian indikator batas aman ini perlu mempertimbangkan dampak fiskal, terutama terhadap pengetatan pos-pos pengeluaran seperti pengeluaran

⁹ <http://www.kompas.com/bisnis/index.htm>

pembangunan atau belanja modal, yang sebetulnya dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Mengenai prioritas penggunaan hutang luar negeri, strategi yang tepat adalah mengutamakan penggunaan hutang luar negeri untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prioritas lain adalah untuk pembangunan bidang infrastruktur, ekonomi, serta pendidikan dan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutang luar negeri, kelembagaan pengelolaan hutang luar negeri pemerintah perlu dibentuk dalam jangka panjang, yaitu DMO. Fungsi DMO bisa dibagi menjadi berbagai fungsi, yakni *front office* (diplomasi utang), *middle office* (pengelolaan), dan *back office* (pengawasan serta monitoring). Ini penting untuk pengelolaan hutang di masa mendatang dan tingkat risiko dari pengelolaan hutang yang salah.

Agar pemerintah memiliki landasan kebijakan pengelolaan hutang luar negeri, perlu ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlunya mengatur secara komprehensif pengelolaan hutang luar negeri. Peraturan itu mencakup aspek strategi pengadaan dan pengendalian hutang, kriteria pemanfaatan, tata kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan. Secara ideal, peraturan itu diwujudkan dalam undang-undang, atau sekurang-kurangnya dalam jangka pendek berbentuk peraturan Presiden.

Inilah yang dipakai pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula Da Silva dalam mengatasi hutang-hutang luar negerinya. Dalam mengelola hutang luar negerinya, pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula

Da Silva mengambil langkah untuk percepatan pencapaian batas aman hutang luar negeri. Strategi ini dianggap mampu mengatasi perekonomian Brazil agar tidak semakin memburuk.

Salah satu upaya pemerintah Brazil di bawah kepemimpinan presiden Lula Da Silva dalam percepatan pencapaian hutang luar negeri Brazil yaitu melunasi hutang-hutang luar negeri nya kepada IMF serta melunasi hutang-hutangnya terhadap Paris Club. Ini dilakukan agar hutang-hutang Brazil sesuai dengan batas aman dalam pengelolaan hutang luar negerinya. Kebijakan ini nyatanya mampu mengangkat perekonomian Brazil yang memburuk kian maju dan membuat Brazil sebagai negara termaju di kawasan Amerika Latin.

3. Teori Persepsi

Persepsi seseorang sangat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Persepsi atau “citra” yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah. Ketika kita bereaksi terhadap dunia disekitar kita, menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda.¹⁰

Kita harus mengakui bahwa orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang “obyektif”....tetapi terhadap “citra” mereka tentang situasi itu yang

¹⁰ Mochtar Mas' oed, *Study Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teoritis*, PAU, Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989, Hal. 19

menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu.¹¹

Persepsi seorang tokoh negara akan ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan negaranya. Hasil ataupun output dari proses pembuatan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh cara pandang tokoh-tokoh negara dalam mendefinisikan suatu situasi tertentu. Cara pandang ataupun persepsi seseorang dalam memandang suatu situasi tergantung dari citra dan sistem keyakinan (belief system) yang dimilikinya.

Menurut Holsti, “ sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan dimasa depan dan prefemsi nilai tentang apa yang “seharusnya terjadi”.

Dari uraian diatas ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam memahami teori persepsi dikaitkan dengan persepsi Lula memandang permasalahan hutang luar negerinya yang dikaitkan dengan keadaan masa lalu Brazil, masa sekarang dan masa depan Brazil membuat Lula Da Silva mengambil kebijakan untuk melunasi hutang luar negerinya terhadap IMF.

Persepsi Lula yang memandang bahwa hutang luar negeri Brazil selama ini telah membuat perekonomian Brazil mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Dipandang dari keadaan perekonomian masa lalu hingga sekarang yang terus bergantung dari sumber dana dari lembaga keuangan Internasional seperti IMF. Hal ini membuat Lula Da Silva memutuskan untuk melunasi hutang-

¹¹ *Ibid*

hutangnya dengan pertimbangan keadaan ekonomi Brazil yang kini mulai membaik, dengan cadangan devisa yang mencukupi untuk menutupi hutang-hutang tersebut.

Persepsi Lula Da Silva dalam masalah hutang Brazil tersebut juga didasari dari harapan Lula agar perekonomian Brazil kedepannya tidak lagi tergantung dari dana yang dikeluarkan oleh IMF. Dengan langkah yang diambilnya ini, Lula beranggapan bahwa perekonomian Brazil nantinya akan menjadi sumber kekuatan negara tersebut terutama dikawasan Amerika latin.

E. Hipotesis

Berdasar rumusan masalah yang kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk menganalisa, maka dapat disimpulkan bahwa presiden Lula Da Silva mengatasi hutang luar negeri ke IMF dengan mempertimbangkan tiga aspek dalam negerinya yaitu Kondisi dalam negeri, Kemampuan ekonomi dan militer dan Konteks Internasional dengan Persepsi bahwa hutang Luar negeri terhadap IMF tersebut telah menghambat kemajuan perekonomian Brazil. Dalam upaya nya mengatasi hutang luar negeri ke IMF, Lula Da Silva melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- (1) Percepatan pencapaian batas aman hutang luar negeri
- (2) Penetapan prioritas penggunaan hutang luar negeri

F. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mengidentifikasi kebijakan makro ekonomi pemerintah Brazil di bawah pimpinan presiden Lula Da Silva di masa pemulihan hutang luar negeri Brazil ke IMF.
2. Mendeskripsikan cara yang ditempuh pemerintah Brazil di bawah pimpinan presiden Lula Da Silva dalam upayanya melunasi hutang ke IMF.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah di butuhkan suatu batasan penelitian. Ini dimaksudkan agar pokok bahasan dalam penulisan ini tidak meluas.

Berdasar hal di atas maka penulis membuat suatu jangkauan penulisan yaitu pada tahun awal tahun 2003 hingga tahun 2008. Penulis mengambil jangkauan pada tahun tersebut dikarenakan pada masa tersebut Presiden Lula Da Silva terpilih sebagai presiden Brazil. Dan kemudian pada 2006 Lula Da silva kembali terpilih sebagai Presiden. Selama masa tersebut perubahan kebijakan Brazil sangat signifikan. Terutama di sektor perekonomian yang memperlihatkan peningkatan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan penulis untuk menyertakan data-data pada tahun-tahun sebelumnya yang masih relevan dengan penulisan ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yakni metode penelitian sosial dalam ilmu sosial yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi

secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis. Strategi dalam metode ini yaitu studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan logika deduktif yakni merangkaikan hubungan sebab akibat yang timbul dari permasalahan yang diteliti sehingga membentuk struktur baru. Data yang dianalisa adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai majalah surat kabar dan internet yang dikumpulkan dengan cara mengolah data-data tersebut sehingga dapat menjadi data yang siap dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan tehnik analisa Isi yaitu menganalisa keseluruhan isi dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah tingkat negara bangsa yakni dengan mempelajari proses pembuatan keputusan yaitu politik luar negeri oleh negara - bangsa sebagai suatu unit yang utuh.

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pembahasan penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang ingin penulis tuangkan dalam penulisan ini, maka perlu penulis buat suatu sistematika penulisan yang penulis rencanakan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Tujuan Penulisan, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Sejarah Hutang Luar Negeri Brazil Terhadap IMF

Bab ini berisikan : Faktor-faktor Brazil mengambil kebijakan hutang dengan IMF, termasuk perkembangan hutang luar negeri Brazil ke IMF

BAB III: Kegagalan Pemerintah Brazil Mengatasi Hutang terhadap IMF.

Bab ini berisikan : Cara-cara pemerintah Brazil sebelum Lula Da Silva dalam upaya menyelesaikan hutang terhadap IMF.

BAB IV: Keberhasilan Lula Da Silva mengatasi Hutang terhadap IMF.

Bab ini berisikan : Kebijakan ekonomi Lula Da Silva, serta upaya berhasilnya pemerintah Brazil dibawah Presiden Lula Da Silva dalam mengatasi hutang terhadap IMF.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisikan : Kesimpulan dari seluruh isi penelitian ini